

Bab I

Pendahuluan

A. Alasan Pemilihan Judul

Industri alas kaki adalah salah satu industry yang menjanjikan dimasa yang akan datang bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia, karena industry ini adalah salah satu industry yang menjadi unggulan Indonesia. Setelah pemerintah kita menggalakkan ekspor dalam sector non migas maka industri alas kaki merupakan salah satu alternatif yang menjanjikan dari berbagai komoditi lainnya dalam fenomena perekonomian dewasa ini. Seiring dengan perkembangan zaman, dimana era perdagangan bebas lebih mengisyaratkan kemunculan liberalisasi khususnya dibidang ekonomi oleh para aktor negara, sehingga menuntut pemerintah Indonesia dalam hal ini Departemen perindustrian yang mempunyai otoritas untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan industri dan perdagangan dalam hal ini khususnya Alas kaki agar dapat eksis menghadapi pasar bebas dan mampu berkompetisi di era perdagangan bebas.

Kegiatan pasar bebas, tepatnya setelah diberlakukannya putaran Uruguay 1994 yaitu disahkannya GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) yang kemudian diubah menjadi WTO (World Trade Organization) pada tahun 1995 ini, muncul aturan main yang jelas dalam babak baru bagi negara-negara di dunia dalam konteks Perdagangan Internasional sekalipun. Kesepakatan ini dibuat bersama-sama maka mau tidak mau setiap negara berkewajiban untuk mematuhi aturan main guna

menjamin perdagangan bebas dunia yang mengutamakan kompetisi demi efisiensi global.

Dengan adanya perdagangan bebas, bagi Negara maju adalah merupakan lahan baru untuk memperbesar daya jangkauan pasar serta meningkatkan keuntungan di berbagai aspek. Sementara bagi Negara-negara berkembang perdagangan bebas merupakan tantangan baru yang harus dihadapi dan sekaligus sebagai ancaman bagi eksistensi mereka dan bagaimanapun mereka (Negara berkembang) harus mampu bersaing dengan Negara lain khususnya Negara maju yang sudah mapan dalam segi ekonominya.

Mengingat hal tersebut maka dapat dijadikan sebuah tantangan baru bagi industri Alas kaki untuk dapat lebih memanfaatkan peluang ini yang mengakibatkan persaingan dalam kualitas produk dan harga, Sehingga membuat industri alas kaki Indonesia ini bisa bersaing pada pasaran global. Untuk itulah peran pemerintah Indonesia dalam hal ini khususnya Depperin dalam hal ini sebagai otoritas yang juga berwenang atas perdagangan luar negeri untuk bisa menciptakan strategi perdagangan guna dapat meningkatkan daya saing industri Alas kaki dalam menghadapi persaingan perdagangan global agar mampu atau tetap eksis dalam perdagangan bebas. Melihat gambaran tersebut penulis tertarik untuk meneliti fenomena ini dengan judul “Upaya Departemen Perindustrian Dalam Meningkatkan Daya Saing Industri Alas Kaki Indonesia Di Era Liberalisasi Perdagangan Internasional.”

B. Latar belakang masalah

Liberalisasi disegala bidang yang ditandai dengan Structural Adjustment Program oleh lembaga - lembaga finansial global, dan disepakati oleh rezim GATT bahkan WTO mewarnai awal adab ini. Liberalisasi terjadi pada saat diterapkannya formasi sosial dalam bentuk baru dengan berlakunya globalisasi perdagangan dunia yang baru. Untuk negara – negara ASEAN termasuk Indonesia telah melakukan kerjasama AFTA bahkan dengan negara asia pasifik menjalin kerjasama APEC, semuanya merupakan langkah menuju kearah globalisasi ekonomi.¹ Berbagai usaha bilateral untuk meliberalkan praktek perdagangan, manajemen perdagangan internasional mengharuskan pengutamaan “fair trade” bukan “free trade” dimana semua bentuk hambatan – hambatan dalam perdagangan bebas hendaknya dapat dihapuskan.

Selama masa quota dahulu jumlah ekspor alas kaki² ke negara-negara Amerika dan Eropa terbatas pada jumlah kuota yang diberikan. Indonesia sebagai salah satu negara produsen alas kaki yang cukup besar merasakan pengaruh dari hambatan non tarif tersebut terhadap ekspor nasional. Semisal pertumbuhan ekspor alas kaki Indonesia tahun 2002 dan 2003 mengalami penurunan, walaupun masih cukup kompetitif. Pelaku usaha persepatuan dan alas kaki cenderung bergelut pada kekurangan bahan baku. Akibatnya, daya saing di dalam negeri maupun di luar negeri tidak optimal. Namun, menurut Kepala Sub Direktorat Ekspor Aneka Industri

¹ *Ekonomi Indonesia dalam menghadapi Era Globalisasi, dalam [http :ss//www.bogor.net/idkf-2/ekonomi Indonesia dalam menghadapi era globalisasi-03-2000-rtf](http://ss/www.bogor.net/idkf-2/ekonomi%20Indonesia%20dalam%20menghadapi%20era%20globalisasi-03-2000-rtf).*

² *Sesuai Depperin, maka alas kaki adalah produk sepatu olahraga, sepatu formal, produk alas kaki lainnya dan komponennya.*

Departemen Perdagangan Iriana Trimurti Ryacudu pada saat itu, daya saing masih bisa ditingkatkan karena adanya faktor-faktor pendukung.

Sebagai gambaran, pangsa pasar produk alas kaki dan persepatuan lokal hanya berkisar 25 persen sampai 30 persen di dalam negeri. Pelaku usaha persepatuan cenderung kesulitan memperoleh bahan baku kulit. Akibatnya, ketergantungan terhadap bahan baku impor mencapai 80 persen. Industri penyamakan dalam negeri cenderung mengekspor pickled, wet blue, dan crust, walau menanggung pajak ekspor (PE) antara 15 persen sampai 25 persen. Padahal potensi pasar ekspor persepatuan sangat besar. Antara tahun 2003 sampai 2007 saja rata-rata pertumbuhan ekspor persepatuan berkisar 6,8 persen per tahun. Oleh karenanya, Departemen Perdagangan sebagai lembaga yang juga terkait menargetkan nilai ekspor tahun ini (2008) sebesar 1,7 miliar dollar AS. Sisanya dikuasai produk impor, terutama China. Demikian pula halnya pasar luar negeri. Meski saat ini terbilang masih kompetitif di pasar global, persepatuan Indonesia belum memenuhi kebutuhan pasar. Lebih dari 70 persen merupakan produk sepatu sport, padahal sekarang permintaan sepatu nonsport terus meningkat. Bila masalah yang menyebabkan penurunan ekspor alas kaki ini tidak segera ditangani, maka sulit bagi Indonesia untuk bersaing dengan negara lain, terutama Cina dan Vietnam yang menunjukkan kinerja ekspor yang semakin meningkat dewasa ini.

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah sudah melakukan langkah strategis guna meningkatkan kinerja industri ini. Salah satu kebijakan strategis yang sudah ditempuh adalah menata kembali pengaturan ekspor

bahan baku, seperti kulit. Sasarannya agar komoditas bahan baku industri sepatu tidak diekspor dalam keadaan mentah. Dengan demikian, produk kulit itu dimanfaatkan oleh industri sepatu di dalam negeri. Hal lain lagi yang menyebabkan kinerja industri sepatu terus menurun, karena pasar yang terdistorsi, yakni masuknya sepatu China yang mengancam kelangsungan industri alas kaki di dalam negeri. Produk itu masuk secara legal maupun ilegal dengan harga yang sangat murah. Akibatnya, persaingan di pasar domestik menjadi tidak seimbang.

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa tidak saja ditandai dengan kemampuan meningkatkan produksi per orang akan tetapi juga ditandai dengan sebagian besar perubahan struktur ekonomi maupun pranata sosial secara pasif. Konteks industrialisasi ditempuh oleh sebagian besar negara berkembang termasuk Indonesia karena industrialisasi cenderung menguntungkan dibanding sektor ekonomi yang lain. Dewasa ini di Indonesia industri alas kaki merupakan salah satu industri padat karya unggulan, salah satu industri strategis setelah ekspor migas bagi sektor perekonomian nasional Indonesia. Industri alas kaki merupakan salah satu industri penghasil devisa dari ekspor non migas serta penyediaan lapangan pekerjaan.

Sebagai lembaga yang berwenang dalam mengurus persoalan perdagangan baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri, maka pemerintah dalam hal ini Depdag diharapkan bisa mengatasi persoalan yang terjadi pada industri alas kaki kita menuju persaingan global. Tantangan ini menjadi semakin besar bukan hanya tantangan eksternal yang ada tetapi juga munculnya pesaing – pesaing baru industri alas kaki yang memiliki keunggulan komparatif dalam harga antara lain China,

Pakistan, Korea Utara, Bangladesh, Vietnam, dsb. Disamping itu muncul Negara industri lapis kedua (NIC's) seperti Taiwan, Singapura, Hongkong, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, dsb. Dan juga tantangan restriksionis dan proteksionis dari negara – negara maju .

Sektor internal khususnya menyangkut kondisi keamanan, produksi, distribusi serta kurangnya pemanfaatan SDM yang berkualitas, sistem pengelolaan manajemen kuota, peraturan – peraturan pemerintah, kenaikan BBM, pajak, dsb. Realitas perkembangan global haruslah direspon oleh perusahaan industri alas kaki nasional dan pemerintah (Depperin), selaku aktor perdagangan bebas sekaligus pelaku – pelaku ekonomi yang lain serta negara itu sendiri dalam meningkatkan daya kompetisi sebagaimana tersirat pada GATT, kualitas barang dan jasa harus ditingkatkan dan harga harus lebih kompetitif, sejalan dalam tuntutan ini dalam GATT adalah harus meliberalkan ekonomi mereka tanpa mengesampingkan isu – isu lingkungan hidup, masalah buruh, maupun hak asasi manusia, serta isu – isu strategis yang lain.

C. Pokok Permasalahan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah “Bagaimana upaya yang dilakukan oleh departemen perindustrian untuk meningkatkan daya saing komoditi alas kaki di era liberalisasi perdagangan? ”

D. Kerangka Pemikiran.

Dalam menganalisa fenomena liberalisasi industri Alas kaki Indonesia ini, penulis menggunakan kerangka pemikiran konseptual, yaitu dengan menggunakan Konsep Perdagangan Bebas, Konsep Kebijakan Perdagangan Strategis (*Strategic Trade Policy*), dan Konsep Daya saing. Konsep Perdagangan Bebas, pada awalnya bermula dari para ekonom liberal yang menganggap bahwa kemakmuran bersama antara dua negara atau lebih akan semakin besar bila perdagangan bebas berlangsung antara mereka. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa masing – masing negara telah memiliki tingkat efisiensi berbeda yang berkenaan pada tingkat produksi serta pemilikan sumber daya ekonomi pada umumnya.

Untuk menghadapi perdagangan bebas, hendaknya pemerintah memberlakukan Konsep Kebijakan Perdagangan Strategis (*Strategic Trade Policy*) dimana kebijakan pemerintah untuk menciptakan keunggulan komparatif dalam perdagangan dengan berbagai cara seperti pemberian subsidi pada kegiatan penelitian dan pengembangan suatu produk hingga mencapai tingkat efisiensi produksi yang lebih baik sehingga dapat memberi usulan dalam pembuatan kebijakan perdagangan strategis kepada pemerintah.

Perdagangan strategis akan lebih ditunjang dengan adanya daya saing yang kuat, maka dalam menangani masalah ini, perlu adanya konsep daya saing. Dimana konsep ini terdiri dari dua bagian, yaitu konsep keunggulan komparatif dan keunggulan bersaing. Tentunya kedua bagian konsep ini sangat mendukung dalam permasalahan ini, dimana persaingan industry alas kaki perlu adanya keunggulan

komparatif, yang mana industry alas kaki perlu mengadakan berbagai inovasi produk, serta tak lupa perlu penerapan pula konsep keunggulan bersaing, yang akan menjawab bagaimana sebuah produk bias menguasai pasar dengan produksi-produksi terbaik dan teknologi terdepan dalam industrinya.

1. Konsep Perdagangan Bebas

Merupakan “Suatu konsep ekonomi dimana lalu lintas transaksi perdagangan antar bangsa dilakukan secara bebas tanpa hambatan, bahwa lalu lintas barang antar negara tidak lagi dibatasi dan dibebani (bebas dari tariff, bea masuk, sistem kuota maupun prosedur pabean) yang rumit dan terkesan berbelit – belit”³. Konsep perdagangan bebas ini berawal dari pemikiran ekonom liberal yang dipelopori oleh David Ricardo dan Adam Smith, yang menyatakan bahwa kemakmuran bersama dua negara atau lebih akan semakin besar apabila perdagangan bebas berlangsung diantara mereka. Menurut David Ricardo dan Adam Smith cara paling efektif untuk meningkatkan kekayaan nasional dengan membiarkan pertukaran antar individu dalam ekonomi domestik dan internasional secara bebas tanpa ada batasan atau dengan kata lain adanya prinsip – prinsip Liberalisme Ekonomi⁴.

Depperin haruslah dapat mempertimbangkan dan merumuskan langkah-langkah yang strategis dalam mensiasati perkembangan dan sekaligus juga menghadapi tantangan yang harus diantisipasi bersama terutama berkaitan dengan

³ Amir, Ms, *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*, Kreasi Jaya Utama, Jakarta, 1993, hal.220

⁴ Dawam, Rahardjo, *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, vol.8, FE UII, Yogyakarta, 1996, hal.36

kualitas produksi maupun persaingan harga industri alas kaki Indonesia dipasaran global.

2. Konsep Kebijakan Perdagangan Strategis (Strategic Trade Policy).

Dalam bukunya yang berjudul “Strategic Trade Policy and new International Economic” Paul R. Krugman menyatakan :

*“International state can pursue policies that give advantage of scale or similar and benefit to its national firm, the state has powerful incentive to intervention in become a major in international competitiveness comparative advantage is larger arbitrary and external ties or spillover for one industry to another exist: the knowledge generated in one sector can benefit other factor and raise the overall the technological level and economy. These states should support and protect those industrial sector that produce rents and are considered to have strategic value for international competitiveness”.*⁵

Negara dapat menentukan kebijakan yang memberikan keuntungan berskala atau serupa dan manfaatnya untuk kepentingan pelaku industri alas kaki ini. Negara memiliki kekuatan intensif untuk melakukan campur tangan dalam persaingan internasional. Keuntungan komparatif mempunyai pengaruh yang besar dan berdampak luas terhadap suatu industri dan juga eksistensi faktor yang lain, kebangkitan ilmu pengetahuan juga dapat menguntungkan faktor – faktor lain serta menimbulkan peningkatan teknologi dan perekonomian.

Praktek perdagangan strategis sering kali dikaitkan dengan kebijakan industrial pemerintah, yaitu kebijakan intervensi ekonomi pemerintah demi mempromosikan suatu pola pembangunan industri yang diinginkan. Dalam Keppres

⁵ Paul R.Krugman, *Strategic Trade Policy And New International Economies*, NIT Press Cambridge, 1996,Hal.15

Nomor 40 tahun 1999 tentang Pembentukan Dewan Pembina Industri Strategis, dapat dikatakan bahwa dalam upaya membangun infrastruktur industri nasional dalam rangka peningkatan ketahanan nasional, perlu mengembangkan industri unggulan berbasis teknologi yang bersifat strategis, mengembangkan industri yang bersifat strategis diperlukan pembinaan yang berorientasi jangka panjang meningkatkan pembinaan dan pengembangan industri-industri yang bersifat strategis⁶. Disamping itu pemerintah juga memberikan kemudahan bagi investor untuk masuk ke berbagai bidang industri. Sejalan dengan itu Depperin melakukan beberapa terobosan yaitu upaya peningkatan daya saing industri nasional dalam rangka menyongsong era globalisasi (SDM dan teknologi). Sesuai dengan amanat GBHN 1999-2004 dan Undang – Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000-2004, maka dibentuklah industri kluster dengan memperkuat industri – industri yang terkait dalam rantai nilai dan juga pemberdayaan serta kemitraan UKM dengan perusahaan. Kesemuanya ini senantiasa diarahkan pada peningkatan utilisasi kapasitas industri , pengembangan UKM, serta ekspor⁷.

3. Konsep Daya Saing (Competitiveness).

Konsep daya saing adalah sebuah konsep ekonomi yang menjelaskan tentang upaya suatu Negara terhadap suatu produk atau komoditi agar mampu diunggulkan di arena perdagangan internasional agar sejajar dengan produk lain

⁶ Keppres RI no 40 th 1999 ttg dewan Pembina industri strategis, www.tempointeraktif.com...,2006,hal2.

⁷ Kompas, edisi, Jum'at, 13 oktober 2005, hal 34.

sejenis, bahkan bisa melebihi produk lain itu yang berasal dari Negara lain.⁸ Banyak Negara melakukan ekspor produk-produknya dengan lebih baik atau dengan harga yang lebih murah dibanding produk dari Negara lain, serta beralih untuk mengimpor produk yang tidak bias diproduksi di dalam negeri secara lebih efektif. Konsep ini dapat dibedakan menjadi dua bagian konsep lagi, yaitu konsep keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan konsep keunggulan bersaing (*competitive advantage*).

Konsep ini dapat menjelaskan realita industri alas kaki nasional saat ini yang makin menurun kemampuan daya saingnya dan ekspornya dibanding produk-produk alas kaki dari Negara lainj sesama pengeksport alas kaki. Disamping itu kenyataan permintaan produk alas kaki dunia selalu meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dunia setiap tahunnya. Hal tersebut menandakan adanya penurunan daya saing industri alas kaki nasional. Karena itu pula perlu ada pembedaan yang jelas tentang pemahaman antara konsep keunggulan bersaing (*competitive advantage*) terhadap realitas industri alas kaki nasional nantinya mampu lebih meningkatkan daya saingnya di era liberalisasi perdagangan internasional.

3.1 Konsep Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*)

Adalah konsep yang menjelaskan tentang keunggulan sebuah Negara untuk memproduksi produknya agar lebih murah dalam segi harga atau lebih bersaing dari Negara-negara lainnya atau kompetitornya. Sebuah Negara dapat dikatakan memiliki

⁸ Ricky W. Griffin & Ronald J. Ebert, *Bisnis* edisi keenam, diterjemahkan oleh Edina C. Tarmidzi, Prenhalindo, Jakarta, Hal 85-86.

keunggulan komparatif akan suatu produk yaitu apabila dapat memproduksi secara lebih efisien dan lebih baik dari negara-negara lainnya. Realita industri alas kaki Indonesia yang juga salah satu industri unggulan Indonesia akhir-akhir ini mengalami penurunan ekspor. Hal tersebut menandakan adanya penurunan permintaan terhadap alas kaki nasional dibanding Negara-negara lain penghasil alas kaki, karena seperti yang penulis sebutkan tadi bahwa permintaan alas kaki dunia akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dunia. Apalagi melihat persentase pasar alas kaki kita yang hanya mencapai 25% sampai 30% di dalam negeri dan hanya 4% untuk persentase eksponnya, dimana produk-produk alas kaki dari Negara-negara lain agaknya punya andil lebih besar dan lebih bisa kompetitif. Dan melihat realita yang ada maka industri alas kaki yang juga industri unggulan dari Negara kita, maka perlu adanya beberapa penerapan konsep ini untuk industri alas kaki kita.

3.2 Konsep Keunggulan Bersaing (Competitive Advantage)

Adalah konsep yang menjelaskan tentang keunggulan bersaing dalam dunia internasional yang berdasarkan dari kombinasi kondisi factor, kondisi permiontaan, industri terkait dan industri pendukung, serta strategi struktuir dan persaingan yang diaplikasikan oleh suatu Negara. Kondisi factor yang dimaksudkan berkaitan dengan factor-faktor produksi yang salalu muncul di setiap kinerja industri tidak terkecuali industri alas kaki nasional yang terdiri dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, permesinan dan segala hal yang dibutuhkan oleh industri alas kaki. Dan melihat realita yang ada di industri alas kaki yang merupakan industri alas padat karya dan

tentunya banyak sekali menyerap tenaga kerja yang di sisi lain adalah jaminan pengaman sosial.

Kondisi permintaan mencerminkan besarnya basis konsumen yang meningkatkan permintaan yang kuat akan produk-produk yang inovatif, pada industri alas kaki, permintaan dunia setiap tahunnya biarpun dikatakan adanya penurunan daya beli masyarakat, karena itulah perlu adanya artikulasinya permintaan untuk lebih mengerti produk seperti apa yang diinginkan oleh konsumen agar alas kaki kita bias meningkatkan daya saingnya di dunia internasional.

E. Hipotesis.

Berdasarkan latar belakang masalah, pokok permasalahan, dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik hipotesa, upaya Depperin dalam meningkatkan daya saing industri alas kaki di era liberalisasi perdagangan internasional adalah :

- a. Maksimalisasi industri alas kaki nasional secara menyeluruh sebagai bentuk upaya peningkatan daya saing.
- b. Pengembangan kerjasama dengan pihak terkait dan perdagangan ekspor industri alas kaki.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejauh mana strategi dan upaya yang dilakukan dan diterapkan oleh pemerintah Indonesia yakni Depperin sebagai lembaga terkait guna meningkatkan daya saing komoditi Alas Kaki Indonesia di era perdagangan bebas, membuktikan hipotesa dengan teori yang relevan, serta untuk memperkaya khasanah keilmuan dibidang ekonomi politik internasional khususnya yang berkenaan dengan perdagangan bebas.

G. Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini haruslah ditetapkan jangkauan penelitian atau batasan penelitian agar penelitian ini mengarah pada sasaran masalah dan tentunya dalam periode waktu tertentu pula. Maka dalam penelitian ini penulis hendak membatasi jangkauan penelitian sejauh mana upaya strategis yang seharusnya dilakukan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan daya saing industri alas kaki dan pembatasan periode data dari tahun 2002-2007 karena dinilai masih kompeten untuk bisa membantu dalam penelitian ini. Serta pengertian alas kaki disini adalah berupa sepatu olahraga, sepatu formal, produk alas kaki lainnya dan komponennya. Dan menurut Depperin, industry alas kaki yang dibahas dalam penulisan ini adalah industry alas kaki nasional yang berbasis di dalam negeri.

H. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif, artinya yang berdasarkan kerangka teori kemudian ditarik hipotesa yang selanjutnya akan dibuktikan melalui data empiris. Pengumpulan data ini dilakukan melalui studi pustaka, oleh karena itu tergolong dalam data sekunder (secondary data) yang diperoleh dari berbagai macam studi kepustakaan yang relevan yang berdasarkan literatur, majalah, surat kabar, internet maupun dokumen ataupun sumber – sumber lain yang dapat disajikan dalam bentuk deskriptif.

I. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan pemilihan judul, rumusan masalah, kerangka berfikir, hipotesa, batasan masalah, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

Bab II. Pengaruh perdagangan bebas terhadap daya saing industry Alas Kaki di Indonesia

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang bagaimana sebuah perdagangan bebas sebagai wujud liberalisasi ekonomi dan gejala menurunnya daya saing industry Alas kaki indonesia

Bab III. Kinerja dan daya saing Industri Alas Kaki Indonesia

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hambatan –hambatan yang dihadapi oleh industry Alas Kaki Indonesia, diantaranya adalah hambatan internal

yang meliputi masalah-masalah dari industry dan pihak – pihak terkait, dan dalam bab ini ada pula pembahasan sector eksternal dari segi hambatan yang dialami.

Bab IV. Upaya Departemen Perindustrian dalam peningkatan daya saing industry alas kaki di era perdagangan bebas

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai maksimalisasi industry alas kaki nasional sebagai upaya peningkatan daya saing, yang meliputi restrukturisasi permesinan industry alas kaki, upaya mengurangi biaya tinggi serta pembentukan industry klaster, lalu peningkatan standarisasi kualitas produk. Lalu juga dibahas pula perkembangan kerjasama strategis terkait dengan ekspor industri alas kaki.

Bab V. Kesimpulan